

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Akuntansi dapat diartikan sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Peranan akuntansi dalam bisnis adalah memberikan informasi untuk digunakan oleh manajer dalam menjalankan operasi perusahaan. Akuntansi juga memberikan informasi untuk pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam menilai kinerja dan kondisi ekonomi perusahaan (Djakman,dkk, 2011:9). Seiring perubahan konsep aktivitas perusahaan, maka akuntansi pun dituntut untuk mampu mencatat tidak hanya aktivitas bisnis, namun juga sejauh mana aktivitas perusahaan terkait *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan.

Corporate Social Responsibility sebagai sebuah gagasan menjadikan perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada nilai perusahaan (*corporate value*) yang diterapkan dalam kondisi keuangannya (*financial*) saja. *Corporate Social Responsibility* sebagai konsep akuntansi yang baru adalah transparansi pengungkapan sosial atas kegiatan atau aktivitas sosial yang dilakukan oleh perusahaan, dimana transparansi yang diungkap tidak hanya mengenai informasi keuangan saja, tetapi perusahaan juga diharapkan mengungkapkan informasi mengenai dampak sosial dan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas perusahaan.

Pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan suatu kegiatan yang sangat penting bagi perusahaan. Hal ini karena dengan mengungkapkan tanggung jawab

sosial maka diharapkan masyarakat akan memberikan respon baik sebagai bentuk hubungan timbal balik yang telah diberikan perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Pengungkapan CSR dapat dilakukan dengan metode pengkodefikasian sesuai *Global Reporting Initiative index* atau biasa disebut indikator GRI.

Di Indonesia terdapat beberapa undang-undang mengenai pelaksanaan CSR pada perusahaan. Salah satunya adalah Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam undang-undang pengaturan mengenai CSR hanya terdapat dalam pasal 74 yaitu (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran, (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kinerja lingkungan merupakan suatu bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitar dalam menciptakan lingkungan yang baik dan lestari. Untuk menilai kepedulian perusahaan terhadap lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup telah mengadakan program penilaian yang dikenal dengan PROPER (Program Penilaian Kinerja Perusahaan). Untuk penilaian PROPER sesuai dengan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup No 3 tahun 2014 terbagi atas beberapa peringkat menggunakan warna dimulai dari yang terbaik emas, hijau, biru merah

dan terburuk adalah hitam. Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 6 tahun 2013, kriteria dalam penilaian proper yaitu mengenai pengendalian dan pengolahan limbah berbahaya dan beracun, pencemaran air, izin lingkungan, sistem manajemen lingkungan, pemanfaatan sumber daya, pemberdayaan masyarakat, penyusunan dokumen. Dengan kriteria tersebut maka perusahaan yang baik tidak hanya mengungkapkan mengenai kepedulian perusahaan terhadap lingkungan tetapi juga mengenai kualitas produk, keamanan produk, tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat sekitar hingga kepedulian perusahaan terhadap keselamatan kerja dan kesejahteraan tenaga kerjanya.

Semakin banyak perhatian perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya dan masyarakat maka akan semakin banyak pengungkapan yang harus dilakukan perusahaan dalam laporan tahunannya. Dengan melakukan pengungkapan akan mencerminkan transparansi dari perusahaan dimana perusahaan bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan, sehingga masyarakat akan mengetahui besarnya tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya.

Akan tetapi berdasarkan hasil penilaian kinerja lingkungan melalui PROPER (Program Penilaian Kinerja Perusahaan) yang dilaksanakan Kementerian Lingkungan Hidup menunjukkan bahwa masih cukup banyak perusahaan yang belum taat terhadap peraturan perundangan lingkungan. Hal ini tercermin dari banyaknya perusahaan yang memperoleh peringkat hitam yaitu dengan nilai terburuk atau sengaja tidak melakukan pengelolaan lingkungan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2013, tahun 2011-2012 terdapat 79 perusahaan yang masuk

diperingkat hitam dan 330 perusahaan diperingkat merah yang artinya pengelolaan lingkungan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan peraturan.

Selain dari peraturan diatas, peraturan lain yang mengatur CSR adalah Undang-Undang No 25 tahun 2007 tentang Penanam Modal pada Bab IX mengenai hak, kewajiban dan tanggung jawab pemodal pada pasal 15 poin b, yaitu melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan undang-undang ini menunjukkan bahwa pemerintah memberi tekanan terhadap penanam modal untuk melakukan tanggung jawab sosialnya.

Kepemilikan publik adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh masyarakat luas diluar perusahaan dan instansi terkait. Dengan adanya kepemilikan publik ini diharapkan perusahaan semakin termotivasi untuk melakukan tanggung jawab sosial dan mengungkapkannya didalam laporan tahunan. Dengan semakin tingginya kepemilikan publik perusahaan akan merasa memiliki tanggung jawab lebih untuk memberikan informasi yang telah dilakukan perusahaan untuk lingkungan dan masyarakat sekitarnya terhadap masyarakat sebagai bentuk pertanggung jawaban dari perusahaan.

Kinerja ekonomi sebuah perusahaan merupakan sebuah capaian perusahaan yang diukur dari segi *financial*. Alat ukur yang sering digunakan adalah dengan rasio-rasio keuangan. Akan tetapi kelemahan dari rasio keuangan ini sangat bergantung terhadap periode dan metode yang digunakan perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan sehingga seringkali hasil rasio menunjukkan hasil yang baik padahal sebenarnya tidak mengalami peningkatan atau bahkan menurun. Selain itu untuk rasio keuangan telah mengabaikan biaya modal,

sehingga perusahaan tidak dapat mengetahui apakah perusahaan tersebut telah menciptakan nilai atau tidak. Untuk itu dikembangkan konsep *Economic Value Added* (EVA). EVA mencerminkan residual *income* yang tersisa setelah dikurangi biaya modal.

Residual *income* yang tinggi akan memberikan peluang bagi perusahaan untuk lebih banyak mengalokasikan dana untuk melakukan tanggung jawab sosial. Dengan banyaknya dana yang dialokasikan maka perusahaan dapat lebih luas melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial, baik itu pengelolaan lingkungan ataupun pengabdian lain yang berkaitan dengan masyarakat. Dengan banyaknya kegiatan yang dilakukan maka semakin banyak pula pengungkapan tanggung jawab sosial yang akan dilakukan oleh perusahaan.

Praktek pengungkapan tanggung jawab sosial diatur oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 revisi 2009, paragraph 12 yang menyatakan perusahaan masih bersifat sukarela dalam mengungkapkan CSR kepada publik melalui laporan tahunan perusahaan. Dampak dari belum diwajibkannya perusahaan dalam melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial adalah perusahaan melakukan pengungkapan dengan sukarela sehingga sampai saat ini masih ada beberapa perusahaan yang tidak melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial sesuai dengan panduan indikator GRI.

Berdasarkan peraturan Bapepam LK.No.X.K.6, perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia terikat oleh peraturan untuk melaksanakan pengungkapan tanggung jawab perusahaan. Akan tetapi peraturan tersebut tidak disertai dengan

pedoman khusus mengenai pelaporan CSR. Hal ini mengakibatkan terjadinya perbedaan pelaporan diantara masing-masing perusahaan sehingga dapat menyulitkan para pembaca laporan tahunan untuk melakukan evaluasi.

Berbagai penelitian terkait dengan pengungkapan CSR menunjukkan hasil yang beragam. Beberapa penelitian yang dilakukan menunjukkan hubungan positif antara kinerja lingkungan dengan pengungkapan CSR antara lain yang dilakukan oleh Angela dan Yudianti (2015), Rahmawati dan Tarmizi (2012) dan Aldilla dan Agustia (2009). Akan tetapi ada penelitian yang tidak berhasil mengungkapkan adanya hubungan antara kinerja lingkungan dengan pengungkapan CSR yaitu penelitian dari Maria Wijaya (2012).

Hubungan antara kepemilikan saham publik terhadap pengungkapan CSR juga menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Hasil penelitian yang dilakukan Nur dan Priantinah (2012), Badjuri (2011), Rahayu dan Indah (2015) menunjukkan adanya pengaruh positif antara keduanya. Akan tetapi penelitian dari Indraswari dan Astika (2015) menunjukkan kepemilikan saham publik berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR.

Kinerja ekonomi atau kinerja keuangan perusahaan juga banyak diindikasikan memiliki pengaruh terhadap pengungkapan CSR. akan tetapi hasil dari beberapa penelitian juga menunjukkan ketidak konsistenan. Hasil penelitian yang dilakukan penelitian Monika dan Hartanti (2009), Yuniarta dan Dharmadiaksa (2011) menunjukkan tidak adanya pengaruh antara keduanya. Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Alifa Ruthinaya (2012) menunjukkan adanya pengaruh antara kinerja keuangan perusahaan dengan pengungkapan CSR.

Dari uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengambil judul skripsi :

“Pengaruh Kinerja Lingkungan, Struktur Kepemilikan Publik dan Kinerja Ekonomi (EVA) Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*” studi empiris pada perusahaan *Go-Public* yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015.

1.2. Rumusan Masalah

Dalam melakukan tanggung jawab sosialnya perusahaan juga memerlukan pengaturan dalam menentukan anggaran untuk melakukan aktivitas – aktivitasnya. Dengan pengungkapan tanggung jawab sosial inilah diharapkan perusahaan dapat dinilai sebagai bentuk tanggung jawab sosial yang telah dilakukan oleh perusahaan.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah kinerja lingkungan mempengaruhi pengungkapan *Corporate Social Responsibility*?
2. Apakah struktur kepemilikan publik mempengaruhi pengungkapan *Corporate Social Responsibility*?
3. Apakah *Economic Value Added* mempengaruhi pengungkapan *Corporate Social Responsibility*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan menjadi topik pembahasan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis secara empiris pengaruh kinerja lingkungan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*
2. Untuk menganalisis secara empiris pengaruh struktur kepemilikan publik terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*
3. Untuk menganalisis secara empiris pengaruh *Economic Value Added* terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pembaca

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan empiris mengenai pengaruh kinerja lingkungan, struktur kepemilikan, kinerja ekonomi terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial. Selain itu juga, penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan yang berguna dalam pengembangan ilmu akuntansi di Indonesia.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi dalam peningkatan nilai tambah dengan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* yang telah mereka lakukan selama ini. Penelitian ini juga dapat menjadikan perusahaan lebih menyadari tentang pentingnya pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dimasa yang akan datang. Selain itu, juga dapat memberikan informasi para

shareholder dan *stakeholder* mengenai aktivitas sosial yang telah dilakukan oleh perusahaan.

3. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini memberikan gambaran sampai sejauh mana pengungkapan tanggung jawab sosial yang telah dilakukan perusahaan. Penelitian ini juga dapat memberikan gambaran keberhasilan program pemerintah yang telah diterapkan pada perusahaan.

1.5. Kontribusi Penelitian

Dalam penelitian sebelumnya keadaan perekonomian di Indonesia sangatlah berbeda dengan kondisi sekarang, sehingga penelitian kali ini dapat dijadikan cerminan dari keadaan perekonomian yang terjadi di perusahaan. Dalam penelitian sebelumnya pengukuran *Corporate Social Responsibility(CSR)* menggunakan indikator GRI G3 tahun 2010, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan indikator GRI G4 tahun 2013.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah kinerja lingkungan, struktur kepemilikan publik dan kinerja ekonomi yang diukur dengan nilai tambah ekonomis (*Economic Value Added*). Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah *Corporate Social Responsibility(CSR)*. Populasi dalam penelitian sebelumnya adalah perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2006-2008 dan 2009-2013. Sedangkan populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2015.